KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima Tahunan 2013-2018, Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Visi dan Misi, Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Program Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Lima Tahun sesuai PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian di Kabupaten Kapuas untuk periode Tahun 2013 s/d 2018.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangan pikiran dan tenaga. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas ketransmigrasian di Kabupaten Kapuas.

Kuala Kapuas, Oktober 2015

Kepala Dinas Transmigrasi
Kabupaten Kapuas,

H. SUKIRAN, S.IP, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610615 198112 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	4
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	4
2.2. Sumber Daya SKPD	14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	15
BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1. Visi dan Misi Dinas Transmigrasi	35
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	35
4.3. Strategi dan Kebijakan	40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	42
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	49
BAB VII. PENUTUP	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kapuas dengan luas wilayah 14.999 Km² atau 1.499.900 ha (9,77 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah) memiliki jumlah penduduk 353.232 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata ± 22,35 Jiwa/Km² terbagi pada 17 (tujuh belas) Kecamatan sehingga merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah yang jarang penduduknya. Dengan demikian berdampak pada pengembangan, pembangunan desa dan kesejahteraan penduduknya. Dari hasil analisa para pakar kependudukan bahwa ada korelasi yang sangat kuat bahwa semakin jarang/rendah kepadatan penduduk pada suatu daerah maka semakin banyak jumlah desa dan penduduk yang miskin. Semakin jarang penduduk semakin rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Hal ini disebabkan karena Sumber Daya alam (SDA) yang ada belum dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolanya.

Transmigrasi merupakan fungsi strategis dalam pembangunan daerah terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Peran akan tugas ketransmigrasian mempunyai arti penting dalam pembangunan daerah sekaligus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.

Persebaran penduduk yang tidak merata akan berakibat ketidak seimbangan lingkungan hidup dan ekosistem alam yang ada. Hal ini yang menyebabkan beragamnya penyebaran penduduk. Kondisi dan potensi antar wilayah yang beragam merupakan situasi yang mendukung terjadinya perpindahan penduduk.

Dengan demikian, maka perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan perdesaan dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan bermutu serta pengembangan/ konsolidasi penataan penduduk melalui program ketransmigrasian sejalan dengan pemekaran daerah di Kalimantan Tengah.

Program pembangunan ketransmigrasian merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut diperlukan adanya pengelolaan administrasi kependudukan, penataan persebaran penduduk melalui pengerahan mobilitas, pengembangan dan pemberdayaan serta pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh system informasi kependudukan dan transmigrasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor : 21 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian.
3. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian.

4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
5. Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
7. Inpres No. 2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan Gambut Eks PLG di Kalimantan Tengah.
8. Peraturan pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan organisasi sebagai daerah otonom.
9. Keppres nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman pangan di Kalimantan Tengah.
10. Keputusan Menakertrans RI nomor : KEP.231/ MEN/I/2002 tentang kriteria usulan program penyiapan permukiman, perpindahan dan penempatan serta pemberdayaan masyarakat binaan dalam penyelenggaraan ketransmigrasian.
11. Keputusan Menakertrans RI nomor: KEP.182/MEN/I/2003 tentang tata cara penyusunan rencana, program dan anggaran Pembangunan Tahunan Di Bidang Ketransmigrasian.
12. Keputusan Menakertrans RI Nomor : KEP.07/MEN/I/2005 tentang Pedoman Umum pengelolaan keuangan Negara Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam Pelaksanaan APBN.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Ditetapkannya perencanaan strategis ketransmigrasian dengan maksud untuk memberikan gambaran sasaran yang ingin dicapai lima tahun kedepan, sebagai acuan dalam penyusunan program ketransmigrasian di Kabupaten Kapuas.

b. Tujuan

Memberikan arah kebijakan pembangunan ketransmigrasian mengenai perpindahan penduduk, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi kawasan pemukiman, pertumbuhan pusat ekonomi daerah, peningkatan keterampilan sumber daya manusia.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penulisan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; khususnya pasal 40 ayat (4). Rencana Strategis ini terdiri dari 7 (Tujuh) Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renstra SKPD, kedudukan Renstra SKPD dalam proses perencanaan pembangunan, dan proses penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Merupakan daftar dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi jangka menengah Kepala Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam Renstra Dinas.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra SKPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah, Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 144 Tahun 2008. Dinas Transmigrasi mempunyai tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketransmigrasian melaksanakan kewenangan daerah di bidang Ketransmigrasian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan informasi dan potensi kawasan Transmigrasi.
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
4. Pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
5. Pembinaan dan koordinasi peningkatan sumber daya masyarakat dan kelembagaan.
6. Pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan di bidang transmigrasi;
7. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan penataan perkembangan penduduk khususnya distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar desa/ kecamatan untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten Kapuas.
2. Pelatihan di bidang ketransmigrasian.
3. Penyajian informasi ketransmigrasian dan persebaran penduduk.
4. Penetapan standar pengelolaan dan analisis data dan statistic ketransmigrasian.
5. Memberikan petunjuk pelaksanaan mediasi lintas daerah dan kerjasama antara kabupaten/ kota di bidang perpindahan transmigrasi.
6. Penyusunan dan penetapan kebijaksanaan di bidang ketransmigrasian untuk mendukung pembangunan secara makro.
7. Penetapan pedoman di bidang ketransmigrasian untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan kabupaten/ kota.
8. Alokasi Sumber Daya manusia potensial.
9. Penetapan kebijakan system informasi di bidang ketransmigrasian.

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 144 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Kelembagaan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas diatur dan dijabarkan Struktur Organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Teknis dan Kerjasama, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis;
 - b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - c) Seksi Kerjasama;
 2. Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a) Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman;
 - b) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi;
 3. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Investasi dan Pemasaran;
 - b) Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status;
 - c) Seksi Pelayanan Transmigrasi
 4. Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Seksi PSM dan Kelembagaan;
 - c) Seksi Evaluasi Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur Pelaksana Otonomi daerah Bidang Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai tugas memimpin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Transmigrasi, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan daerah serta menerima dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, organisasi dan lembaga lain di daerah. Kepala Dinas membawahi :

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Teknis dan Kerjasama
- 3) Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan
- 4) Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- 5) Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pengelolaan sumber daya dilingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Pelaporan;
- 2) Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- 3) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Umum dan Keprotokolan serta Kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahkan :

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana dan analisis kebutuhan perlengkapan kantor.
- b) Melakukan penelitian barang / perlengkapan menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga patokan yang wajar sebagai bahan penetapan pedoman standard harga yang menguntungkan negara.
- c) Mengumpulkan rencana kerja dari masing-masing bidang, merangkum dan membuat laporan rencana kegiatan tahunan maupun rencana kerja mendesak.
- d) Membuat laporan kegiatan baik triwulan maupun laporan tahunan.
- e) Menyusun rencana anggaran APBD dan APBN.

- f) Menyimpan dan pengarsipan laporan kegiatan.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam mendukung kelancaran kegiatan.
- 2) Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan menyimpan surat surat berharga, DIPA, DIP, PO, SKO, Cek Giro Keuangan.
 - b) Menghimpun surat-surat berharga yang menyangkut barang-barang milik Negara/Daerah
 - c) Melakukan pengaturan surat menyurat pengelolaan keuangan
 - d) Menerima dan melakukan penyimpanan uang dan surat-surat berharga serta melaksanakan pembayaran dan penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan
 - e) Melakukan penelitian terhadap semua bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran
 - f) Melakukan penyusunan daftar gaji secara akurat dari informasi kepegawaian
 - g) Melakukan urusan permintaan gaji ke Bagian Keuangan / Kas Daerah
 - h) Melakukan pembayaran Gaji kepada pegawai
 - i) Melakukan pengurusan dan pembayaran tunjangan-tunjangan dan berkala
 - j) Merencanakan dan menyusun usulan kegiatan belanja langsung
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan
- 3) Sub Bagian Tata usaha
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a) Melakukan penyusunan rencana formasi kepegawaian.
 - b) Menyiapkan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji pegawai, dan pelantikan pejabat.
 - c) Menyusun analisa kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi menurut jenis / sifat pekerjaan termasuk menyusun DUK.
 - d) Menyusun daftar rencana dan proses usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala.
 - e) Melaksanakan pengurusan pemberhentian pegawai pension, meninggal dunia dan kepindahan
 - f) Melakukan pengurusan usulan / penyelenggaraan Diklat.
 - g) Melaksanakan pembinaan pegawai, pelaksanaan hukuman/sanksi pelanggaran disiplin pegawai.

- h) Melakukan pengadaan perlengkapan dan perbekalan kantor dengan bekerjasama dengan TIM / panitia pelelangan.
- i) Melakukan urusan penyampaian dan pemeliharaan serta menyusun Administrasi Barang Mutasi dan Inventarisasi.
- j) Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi kantor dan perlengkapan tempat kerja
- k) Melakukan urusan keprotokoler dan upacara serta keamanan kantor dan perlengkapan kantor.
- l) Melakukan kegiatan urusan absen / daftar hadir.
- m) Melakukan penyelesaian administrasi pembayaran tagihan yang berhubungan dengan urusan urusan dalam / rumah tangga.
- n) Melakukan surat-menyurat dan pengarsipan.
- o) Memelihar dokumen dan naskah-naskah lainnya.
- p) Melakukan penerimaan, pengagendaan surat-surat/dokumen dan barang kiriman.
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

c. Bidang Teknis dan Kerjasama

Kepala Bidang Teknis dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan program teknis ketrasmigrasian dan kerjasama Antar Daerah. Kepala Bidang Teknis dan Kerjasama, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melakukan koordinasi lintas sektor dan antar daerah.
- 2) Melakukan dan memfasilitasi kerjasama antar daerah.
- 3) Melakukan pembinaan atas bawahannya.

Kepala Bidang Teknis dan Kerjasama membawahkan :

- 1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis;
- 2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- 3) Kepala Seksi Kerjasama.

1) Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Teknis mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan antar daerah.
- b. Melakukan perencanaan teknis kegiatan fisik dan non fisik;
 - Pembukaan areal permukiman baru
 - Daya tampung permukiman baru
 - Pola transmigrasi.
- c. Melaksanakan evaluasi kegiatan
- d. Menyusun laporan rencana kegiatan Bidang dan menyampaikan rencana kerja kepada atasan.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Mengumpulkan data dari bidang-bidang lain.
- c) Mengadakan perjalanan dinas ke lokasi untuk mendata dan identifikasi data.
- d) Mengolah dan mengaudit data.
- e) Memberikan informasi kepada instansi lain jika diperlukan.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3) Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan koordinasi antar daerah yang menyangkut kerjasama ketransmigrasian.
- c) Melaksanakan kegiatan evaluasi kerjasama.
- d) Melakukan kegiatan penyusunan naskah kerjasama.
- e) Mengadakan rapat-rapat pertemuan mengenai kerjasama.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

d. Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan

Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan survey, identifikasi areal, pemetaan, pendaftaran, seleksi dan penempatan.

Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi Lintas sektor
- 2) Mengevaluasi persiapan penempatan.
- 3) Pembinaan dan pembagian tugas bawahannya.

Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan membawahi :

- 1) Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman;
- 2) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

- 1) Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman

Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor
- b) Melaksanakan kegiatan survey dan identifikasi areal.
- c) Melaksanakan pemetaan dan pengukuran areal.
- d) Melakukan penyiapan areal.
- e) Melakukan pembangunan permukiman.
- f) Melakukan evaluasi pembangunan permukiman.
- g) Melaksanakan kegiatan monitoring.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

- 2) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan

Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor
- b) Menyiapkan blanko isian pendaftaran.
- c) Melakukan sosialisasi di desa/Kecamatan tempat pendaftaran.
- d) Melakukan pendaftaran calon transmigran.
- e) Melakukan seleksi calon transmigran.
- f) Menetapkan calon transmigran.
- g) Mengumumkan calon transmigran.
- h) Melaksanakan penampungan calon transmigran di tempat penampungan / transit.
- i) Mempersiapkan tempat penampungan/transito.
- j) Melaksanakan pelayanan pemakanan selama ditempat penampungan.
- k) Melaksanakan pelayanan kesehatan ditempat penampungan/transito.
- l) Memberangkatkan calon transmigran kelokasi tujuan.
- m) Mengusulkan dan menempatkan transmigran pecahan KK.
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor

- b) Melakukan survey dan identifikasi sarana jalan dan jembatan, gorong-gorong dan jalan Desa serta jalan usaha tani
 - c) Melaksanakan pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, jalan desa dan jalan usaha tani.
 - d) Melaksanakan peningkatan sarana jalan dan jembatan
 - e) Melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.
- e. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai Tugas pokok yaitu melakukan arahan teknis yang menyangkut bidang pengembangan dan peningkatan usaha-usaha ekonomi, pemasaran hasil-hasil masyarakat dan kawasan transmigrasi. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi lintas sektor
- 2) Memfasilitasi pemasaran hasil-hasil produksi transmigran kepada pihak kedua.
- 3) Memfasilitasi pihak swasta yang akan menanamkan investasi di kawasan transmigrasi.
- 4) Pembinaan Staf dan bawahannya.

Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Usaha ekonomi, Investasi dan Pemasaran
- 2) Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status
- 3) Seksi Pelayanan Transmigran.

- 1) Seksi Pengembangan Usaha ekonomi, Investasi dan Pemasaran

Seksi Pengembangan Usaha ekonomi, Investasi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan pembinaan ekonomi dan pemasaran.
- c) Membagikan bantuan sarana produksi dan alsintan.
- d) Melakukan identifikasi usaha-usaha ekonomi.
- e) Membuat usulan bantuan sarana produksi dan alsintan.
- f) Membuat usulan bantuan pendukung usaha ekonomi.
- g) Mengusulkan Diklat peningkatan usaha ekonomi.
- h) Melakukan negosiasi dengan pihak investor.
- i) Melakukan negosiasi pemasaran hasil-hasil transmigran.
- j) Melakukan pendistribusian bantuan-bantuan.

- k) Melakukan pembinaan bagi kader-kader pelaku usaha ekonomi keluarga (home industri).
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2) Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status

Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan identifikasi lahan pekarangan dan lahan usaha.
- c) Mengusulkan sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha.
- d) Membagikan sertifikat.
- e) Melakukan identifikasi UPT-UPT siap serah.
- f) Melakukan identifikasi lahan-lahan kosong dan lahan Restan.
- g) Mengusulkan UPT-UPT siap serah menjadi Desa Definitif.
- h) Membuat naskah penyerahan UPT-UPT siap serah menjadi Desa Definitif.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3) Seksi Pelayanan Transmigran

Seksi Pelayanan Transmigran mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Membuat blanko/kartu pembagian jaminan hidup.
- c) Melakukan urusan pelayanan jaminan hidup.
- d) Melakukan urusan pelayanan kesehatan transmigran.
- e) Melakukan pelayanan pendidikan transmigran .
- f) Melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak transmigran.
- g) Melakukan pelayanan KB.
- h) Melakukan pelayanan perbaikan gizi anak dan ibu hamil.
- i) Pembinaan bagi kader-kader kesehatan dan dukun bayi dilokasi.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

f. Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan

Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan koordinasi, arahan teknis, membina serta melakukan kegiatan pelatihan keahlian dan pembinaan bagi perangkat desa dan pengurus lembaga lainnya. Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi lintas sektor.
- 2) Mempersiapkan pendidikan dan Pelatihan ketrampilan dan keahlian.
- 3) Pengarah teknis dalam bidang pendidikan, keahlian, ketrampilan.
- 4) Pembina kelompok/lembaga di kawasan permukiman.
- 5) Pembina staf dan bawahannya.

Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan terdiri dari :

- 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan
- 3) Seksi Evaluasi Pelatihan.

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Menyusun jadwal pelatihan (tempat, waktu, jumlah peserta, lamanya)
- c) Melaksanakan kegiatan pelatihan keahlian.
- d) Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan.
- e) Melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perangkat desa.
- f) Melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pengurus-pengurus lembaga keuangan mikro dan KUD.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2. Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan

Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan inovasi dan pembinaan kelompok-kelompok usaha masyarakat
- c) Melaksanakan pembentukan Perangkat desa, KUD, Karang Taruna, Kelompok Pemberdayaan, Kelompok Usaha Tani (Kelompok Tani) dan kelompok-kelompok usaha ekonomi keluarga.
- d) Melaksanakan penerimaan dan pembinaan TKPMP transmigrasi.
- e) Melaksanakan pendataan calon Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
- f) Mengusulkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3. Seksi Evaluasi Pelatihan

Seksi Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Membuat sertifikat pelatihan
- c) Melaksanakan evaluasi pelatihan

- d) Membuat usulan pelatihan-pelatihan dan kebutuhan pelatihan
- e) Membuat penilaian peringkat pelatihan
- f) Membagikan sertifikat pelatihan
- g) Membuat laporan pelatihan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Permukiman Transmigrasi

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas untuk melaksanakan pelayanan masyarakat atau transmigran dibidang pendistribusian jaminan hidup, pendistribusian perbekalan dan perlengkapan transmigran, pendistribusian bantuan usaha ekonomi, pendistribusian bantuan kelembagaan, penempatan transmigran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan KB, pembentukan dan pembinaan perangkat Desa, lembaga usaha ekonomi (Kelompok tani), KUD, Kelompok pemberdayaan perempuan dan pemuda serta Karang Taruna.

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Permukiman Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Kepala Unit Permukiman Transmigrasi
2. Koordinator pelaksana di lokasi
3. Pembina lembaga, TKPM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, karang taruna dan perangkat desa.
4. Menampung dan menyampaikan program di lokasi.

2.2. Sumberdaya SKPD

A. Keadaan Kepegawaian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas memiliki sumberdaya manusia berjumlah 71 orang, terdiri dari 46 Orang PNS dan 25 Orang Tenaga Honorer. Untuk jumlah berdasarkan **Pangkat dan Golongan** yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kepegawaian SKPD yang melaksanakan Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian Tahun 2013

No	Jumlah Pegawai	Latar belakang tingkat pendidikan	Pangkat dan Golongan ruang	Pejabat Struktural dan Fungsional
1	2	3	4	5
1.	Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas :			
	Jumlah Pegawai secara keseluruhan 46 orang	S-2 5 orang S-1 21 orang SMA 18 orang D-III 1 orang SD/SMP 1 orang	IV 4 orang III 31 orang II 10 orang I 1 orang	Eselon : II 1 orang III 5 orang IV 15 orang

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Transmigrasi Tahun 2013

Dalam upaya untuk meningkatkan SDM yang handal dan profesional terutama sebagai tuntutan tugas birokrasi (pegawai) dan kemasyarakatan (public figur) seiring dengan isue era otonomi daerah dan globalisasi untuk menyongsong pemerintah yang bersih dan baik (good governance dan clean governance) maka Dinas Transmigrasi Kapuas proaktif menyertakan pegawai yang dipandang mampu untuk mengikuti ke berbagai diklat, Secara operasional strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas di bidang pembangunan Ketransmigrasian.

B. Asset / Modal yang dimiliki SKPD.

Asset / Modal / sarana prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2013-2018 sebagaimana terlampir.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam kurun waktu 1997 s/d 2012 Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas telah menempatkan dan memberdayakan 9.311 KK atau 36.412 jiwa transmigran dan membina 37 UPT yang tersebar di 3 Kecamatan.

Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tabel 3.2 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Tantangan utama dalam bidang transmigrasi pada umumnya adalah minimnya jumlah aparatur ketransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran, selanjutnya hasil analisis KLHS bahwa keterbatasan lokasi transmigrasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi. Disisi lain terdapat banyak Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang telah dibuka tanpa atau kurang

memperhatikan aspek aksesibilitas yang lebih menjamin pemasaran, pemilihan SDM yang memiliki kompetensi, pilihan lahan yang relative subur dan kemitraan semua pihak. Disamping itu pengolahan/pemanfaatan lahan usaha belum optimal, produktivitas lahan masih rendah, serta kegiatan pengembangan usaha belum diprioritaskan.

Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada Tabel Tabel 4.2. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L, Tabel 5.2. Hasil telaah Struktur Wilayah Kabupaten Kapuas, Tabel 6.2. Hasil telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas dan Tabel 7.2. Hasil Analisa terhadap Dokumen KLHS.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas adalah :

- Lahan usaha dan lahan pekarangan warga transmigrasi sering terendam banjir.
- Minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi.
- Kondisi sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi, hal ini disebabkan belum optimalnya dukungan sector terkait untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

Uraian lebih detail tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dapat dilihat Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Tabel 2.3. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) dan Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas transmigrasi Kabupaten Kapuas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala Daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Transmigrasi, oleh karena itu isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Visi Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan”

Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas :

1. Mempercepat Pembangunan Peningkatan Jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan

pemukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.

2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang
3. Mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ke tiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah bagi seluruh masyarakat kabupaten kapuas melalui kelembagaan adat dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 Tahun pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan ketrampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan Balai Latihan Kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olah raga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
12. Meningkatkan peran dan fungsi kepala desa, perangkat desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir adat, basir, pemangku agama hindu, pedanda serta memberikan insentif.
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan

meningkatkan kesejahteraan PNS, Tenaga Kesehatan dan Guru Non PNS, Penyediaan Fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.

Tabel 4.3. Menggambarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten

Yang menjadi permasalahan dibidang ketransmigrasian pada umumnya adalah minimnya jumlah aparatur ketransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran dan koordinasi dan kerjasama lintas sector dan lintas pelaku belum optimal.

Berikut Tabel 5.3. Menggambarkan Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya.

3.4. Telaahan Renstra Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, pengembangan transmigrasi Kabupaten Kapuas dihadapkan pada keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK). Disamping itu permasalahan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan Perusahaan Perkebunan. Disisi lain animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi sangat tinggi.

Hasil Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 6.3, Tabel 7.3 dan Tabel 8.3.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan di atas, dapat ditentukan sasaran dibidang ketransmigrasian sebagai berikut :

- Untuk sasaran jangka menengah, yaitu peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan aparatur Penyelenggara Transmigrasi, Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan transmigrasi.
- Implikasi RTRW membawa dampak pelayanan dibidang ketransmigrasian antara lain tidak tersedianya lokasi transmigrasi, calon lokasi transmigrasi tumpang tindih dengan lahan perkebunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Transmigrasi.

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kapuas yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan” Dinas Transmigrasi dalam mengemban tugasnya mempunyai visi :

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri.”

Pernyataan Visi diatas disertai dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Masyarakat Transmigrasi memiliki arti adanya seleksi calon transmigran dan pemberian pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku guna membangun kehidupan bermasyarakat dan mengembangkan usaha di kawasan Transmigrasi.
2. Yang Mandiri memiliki arti meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Adapun Misi Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia transmigran dan distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar desa/Kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelatihan usaha pertanian masyarakat.
3. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang berkelanjutan.

Tabel 1.4. Penjelasan Penyusunan Penjelasan Visi dan Misi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam kerangka untuk mewujudkan visi Kabupaten Kapuas yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan”, Dinas Transmigrasi mempunyai tujuan :

1. Terlaksananya pengembangan kawasan / Persiapan Permukiman transmigrasi
2. Terlaksananya pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
3. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.

Sedangkan Sasaran Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya pengembangan kawasan permukiman transmigrasi dan terfasilitasinya penempatan baru sebanyak 480 KK di 6 UPT dan kerjasama daerah
2. Meningkatnya pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
3. Membangun fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.

Tabel 2.4. Adalah gambaran Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan SKPD.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM Transmigran dan distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar Desa/Kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas strategi yang ditempuh antara lain pembangunan daerah melalui pembangunan unit-unit permukiman transmigrasi yang terintegrasi dalam Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Wilayah Pengembangan Parsial (WPP). Selanjutnya mendorong pertumbuhan desa-desa yang kurang berkembang melalui penambahan penduduk dan pembangunan prasarana.

2. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi di Kabupaten Kapuas dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarganya dinas transmigrasi sesuai Tupoksinya melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memandirikan, keswadayaan dan keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensinya secara utuh dan komprehensif guna meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat.

Tabel 3.4. Menguraikan secara detail Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Guna mendukung pencapaian Visi Misi serta untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok dinas, maka disusunlah program dan kegiatan yang masih bersifat indikasi dengan disertai dengan kerangka tolok ukur/indicator hasil dan keluaran yang ingin dicapai. Renstra secara ideal menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan SKPD Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang diharapkan berjalan secara konsisten selama 5 (lima) tahun ke depan. Program dan Kegiatan yang disusun dalam Renstra adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
14. Penyediaan Jasa Non PNS.

Indikator Kinerja : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebeleur
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Indikator Kinerja : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

III. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian KORPRI
3. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Indikator Kinerja : Peningkatan disiplin aparatur

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

IV. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Kegiatan :

1. Pemulangan pegawai yang pensiun

Indikator Kinerja : Terpenuhinya kesejahteraan PNS

Kelompok Sasaran : Pegawai yang menjelang pensiun

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

V. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator Kinerja : Terwujudnya SDM aparatur berbasis kompetensi dan profesional

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VI. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator Kinerja : Tersedianya dan tersusunnya Laporan capaian kinerja

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas dan instansi terkait

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VII. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan :

1. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
2. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
3. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
4. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
5. Penyelesaian Masalah Pertanahan Lokasi Transmigrasi

6. Rehabilitasi Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja : Berkembangnya wilayah transmigrasi

Kelompok Sasaran : Warga Transmigrasi, sarana prasarana, fasilitas umum di wilayah transmigrasi

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VIII. Program Transmigrasi Lokal

Kegiatan :

1. Pelatihan Transmigrasi Lokal
2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
3. Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi.

Indikator Kinerja : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal.

Kelompok Sasaran : Warga Transmigran

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

IX. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Kegiatan :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja : Jumlah sarana dan prasarana yang dapat dibangun.

Kelompok Sasaran : Sarana dan prasarana

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

Berikut ini Tabel 1.5. Menggambarkan Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Transmigrasi mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan pada RPJMD : Meningkatkan Konektivitas antarwilayah yang memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah.

Tujuan pada RENSTRA DINAS : Terlaksananya Pengembangan Kawasan / persiapan Permukiman Transmigrasi dan Terlaksananya pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

SELANJUTNYA :

Sasaran pada RPJMD : Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.

Sasaran pada RENSTRA DINAS : Terfasiltasinya pembangunan kawasan permukiman transmigrasi dan Terfasiltasinya penempatan baru sebanyak 480 KK di 6 UPT dan Kerjasama Daerah serta Terlaksananya pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Indikator yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 1.6. dibawah ini :

BAB VII

P E N U T U P

Dengan selesainya penyusunan RENSTRA SKPD 2013-2018 ini diharapkan pelaksanaan kinerja SKPD didasarkan pada Perencanaan Strategik yang didalamnya berisi sasaran – sasaran strategik yang merupakan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Selanjutnya diharapkan adanya dukungan dana yang memadai baik dari Pemerintah Pusat melalui Tugas Pembantuan maupun dari Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui APBD, sehingga seluruh program dan kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran yang telah disusun dapat tercapai.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketransmigrasian Kabupaten Kapuas jangka menengah sebagai implementasi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Kuala Kapuas, Oktober 2015

Kepala Dinas Transmigrasi
Kabupaten Kapuas,

H. SUKIRAN, S.IP, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610615 198112 1 010